

MITRA DJP ANDALAN WP

Sebagai konsultan pajak, ia tegas memosisikan dirinya di tengah-tengah kepentingan DJP dan Wajib Pajak.

▶ SAUT HOTMA HASUDUNGAN SIBARANI
Partner TaxPrime

Penulis: Ruruh Handayani
Foto: Rivan Fazry dan Dok. TaxPrime

Di tengah peraturan perpajakan yang terus dinamis, Wajib Pajak (WP) dituntut untuk mengetahui jenis pajak yang benar sebelum melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan agar tak terjebak dalam sengketa (*dispute*) di kemudian hari.

Semakin banyak jenis penghasilan serta semakin besar dan kompleks usaha seorang WP, semakin banyak pula aturan pajak yang terkait dan harus diikuti. Ini kerap menimbulkan keruwetan bagi si WP. Akhirnya, sebagian WP—terutama WP badan yang baru merintis usaha—enggan mengurus pajak lantaran merasa tidak punya cukup waktu, biaya, dan tenaga lagi. Di tengah pandemi apalagi. Banyak pelaku usaha yang alpa mengurus pajak lantaran harus berjuang mempertahankan likuiditas perusahaan. Sementara, pembatasan mobilitas dan aktivitas membuat komunikasi WP dan fiskus harus dilakukan secara daring, sehingga sering terjadi ketidakcocokan data yang nantinya berujung sengketa di Pengadilan Pajak maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Di sinilah profesi konsultan pajak berperan penting. Ya, meski Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menyiapkan *account representative* (AR), banyak WP yang lebih nyaman meminta jasa konsultan pajak untuk berkonsultasi atau membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka di kasus-kasus tertentu.

Mantan fiskus

Adalah Saut Hotma Hasudungan Sibarani, seorang konsultan pajak sekaligus Partner TaxPrime di divisi Tax Dispute and Litigation yang kerap menjadi tumpuan WP dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Sebelum bergabung dengan TaxPrime di akhir 2017, Saut merupakan aparatur sipil negara (ASN) di DJP selama 21 tahun.

Pengalaman kerja Saut sebagai fiskus pun beragam, mulai dari pemeriksa pajak, AR, hingga kepala seksi pengawasan dan konsultasi (kasi waskon). Saut menuturkan, menjadi petugas pajak harus siap dimutasi ke mana pun hingga pelosok negeri. Di daerah-daerah tertentu, fiskus akan menghadapi tantangan dan risiko kerja yang lebih besar ketimbang di Jakarta.

Saat Saut dimutasi ke Pontianak, Kalimantan Barat, tantangan terberat yang dirasakannya adalah mesti hidup dan bekerja jauh dari keluarga. Dua pekan pertama bekerja di sana ia jalani dengan susah payah lantaran belum bisa beradaptasi dengan lingkungan.

“Saya sedih, selama dua minggu nangis tiap malam. Dulu, kan, belum ada *video call*, WA—paling baru Skype. Apalagi waktu pertama kali berangkat itu saya enggak sempat pamitan sama anak-anak, karena sudah mepet dengan keberangkatan pesawat,” kenang Saut saat berbincang dengan *Majalah Pajak* melalui *video conference*, Jumat (13/8).

Pengalaman lainnya adalah bertugas menemui WP yang tak jarang menghardik hingga mengancam nyawanya.

“Saya lagi melakukan penelitian di lapangan. Ada salah satu penguasa daerah di sana, saya belum masuk rumahnya sudah dibentak-bentak, diancam mau

dibunuh. Itu yang saya dan tim sering alami di lapangan saat melaksanakan tugas. Teman-teman pajak menggali penerimaan pajak, tapi kadang-kadang terbentur dengan ‘penguasa-penguasa daerah,’” ungkapnya.

Saat menjadi fiskus, lulusan PKN STAN ini menyayangkan keberadaan konsultan pajak di daerah yang masih sangat minim jika dibandingkan jumlah biro jasa. Padahal, keberadaan konsultan pajak—utamanya di daerah—sangat dibutuhkan untuk membantu menyuarakan peraturan pajak yang benar. Maklum, jumlah petugas pajak masih timpang dengan banyaknya WP.

Saut pun meyakini, jika biro jasa tidak memiliki sertifikasi, maka ia tidak memiliki kualifikasi dalam menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Akibatnya, kewajiban perpajakan yang diurus belum tentu benar.

Lagi pula, dalam aturan perpajakan jelas tercantum bahwa WP hanya bisa memberikan kuasa kepada konsultan pajak atau seorang yang memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan. Saut pun tetap kukuh pada peraturan dan menolak berurusan dengan biro jasa sampai-sampai dianggap sebagai musuh mereka.

“Secara peraturan, teman-teman otoritas pajak tidak boleh menerima orang



**KONSULTAN PAJAK HARUS MEMBANTU
 DJP MENJAGA INTEGRITAS. KITA HARUS
 MAMPU MENYAMPAIKAN PERATURAN
 YANG BENAR KEPADA KLIEN AGAR
 MEREKA PATUH DENGAN ATURAN ITU.**



Foto: Dok. TaxPrime

yang tidak memiliki izin atau sertifikasi. Kan, kalau mau ujian sertifikasi (konsultan pajak), pasti orang itu mempersiapkan diri, mempelajari peraturan. Nah, kalau belum sertifikasi, apakah bisa yakin mereka menguasai peraturan? Karena kadang-kadang mereka cuma bilang, 'Pak, tolong Pak'. Ilmunya cuma 'tolong,'" ujarnya.

Saut juga berpesan fiskus tetap mengikuti peraturan agar tak ada ruang gerak untuk biro jasa yang tak memenuhi kualifikasi. Dengan begitu, akan banyak orang yang mau menjadi konsultan pajak dan membantu masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Semua tantangan yang dihadapinya tersebut tak pernah membuatnya gentar mengemban tugas negara hingga di pelabuhan terakhirnya sebagai ASN, yakni menjadi kasi waskon di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Ia bersyukur, dengan berbagai reformasi perpajakan yang terus dilaksanakan hingga saat ini, fiskus di daerah bisa bekerja lebih aman dan profesional.

"Saya merasa DJP lebih baik dari segi pelayanan. Dari segi untuk menguji kepatuhan, proses pemeriksaan juga lebih baik. Pemeriksa lebih mau mendengar, melihat dokumen, dan melakukan pembahasan dengan WP. DJP lebih bagus dan semakin memperbaiki," ucap pria kelahiran Padang, 8 Juni 1975 ini.

Di sisi lain, ia berharap agar AR bisa dibekali amunisi data lebih banyak agar bisa menggali potensi penerimaan lebih baik lagi.

"Saya minta ke DJP, tolong teman-teman AR itu di-back up, disediakan data yang valid untuk mereka. Ibarat disuruh perang harus disediakan pelurunya. Jangan mencari peluru masing-masing. Lalu, teman-teman bisa mendapatkan pembekalan analisis laporan keuangan, penggalan potensi. Saat ini, kerja DJP berat karena penerimaan negara turun, tapi biaya tinggi. Jadi, DJP perlu orang-orang yang lebih profesional, bagaimana caranya menarik penerimaan, tapi tidak melanggar peraturan."

Dokter pajak

Pengalaman Saut bekerja menjadi insan DJP membuatnya menjadi sosok teliti dan pandai menganalisis, dan itu membantunya menjadi konsultan pajak yang andal dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Boleh dibilang, Saut dianggap sebagai "dokter" pajak karena memiliki jam terbang yang tinggi dalam menyembuhkan permasalahan pajak klien-kliennya.

Ya, spesialisasi Saut adalah sengketa dan litigasi pajak. Namun siapa sangka, ia pernah merasakan demam panggung saat pertama kali menjadi kuasa WP di pengadilan pajak. Kala itu, ia merasa seluruh adegan mendebarkan di persidangan yang pernah ia tonton di televisi akan dialaminya.

"Awal-awal saya disuruh pegang sidang, keringat dinginnya minta ampun—melihat diri sendiri, di samping kanan ada DJP, di depan ada hakim," ucapnya.

Namun, setelah beberapa kali menjalaninya, Saut bisa menjalani persidangan dengan baik karena ia yakin telah menyiapkannya dengan sangat matang. Terpenting, menjadi konsultan pajak harus bisa menempatkan diri di tengah antara kepentingan WP dan DJP.

Artinya, ia harus mengerti betul permasalahan dan motivasi WP. Setelah itu, ia dan tim akan memeriksa dengan saksama seluruh dokumen WP dan peraturan perpajakan yang berlaku.

"Memang, kami terikat kontrak dengan klien, tapi kami berusaha untuk menempatkan diri di tengah. Contoh, jika di pengadilan pajak alat bukti yang digunakan oleh hakim itu pertama peraturan, kedua dokumen, yang ketiga adalah keyakinan. Jadi, kita lihat dulu WP ini benar atau enggak secara aturan pajak dan dokumennya. Ibarat kata, WP sudah salah secara peraturan, mau diselesaikan masalah pajaknya seperti apa pun juga sudah susah," tutur Saut.

Kenal dan paham bisnis WP juga merupakan keharusan bagi dirinya dan tim di TaxPrime. Karena, masing-masing sektor usaha—bahkan masing-masing perusahaan—memiliki penerapan pajak yang berbeda.

"Bisnis *manufacturing*, konstruksi, *provider*, atau *on-line game*, itu, kan, beda-beda. Baik sistem pencatatannya, atau sistem peraturannya pun beda. Dari sistem pencatatannya saja PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang

Foto: Dok. TaxPrime



digunakan juga berbeda. Jadi, kita harus tahu dulu bisnis WP itu apa, dari situ baru bahas sengketa,” kata Saut.

Di samping itu, mengetahui secara persis bisnis WP juga akan memudahkannya saat berhadapan dengan pemeriksa di kantor pajak.

“Kita harus buat pemeriksa tahu dulu bisnis, kalau langsung tiba-tiba disodorkan catatan, pemeriksa pasti menganggap semuanya sama. Kalau pemeriksa tidak diberikan gambaran sistem pencatatannya, yakinlah pasti akan ada sengketa atau koreksi.”

Jaga integritas

Saut yang senang berdiskusi ini mengemukakan, konsultan pajak juga berperan strategis dalam sistem perpajakan. Selain dapat memengaruhi keputusan WP terkait kepatuhan mereka, konsultan pajak juga mesti ikut menjaga integritas fiskus. Menurutnya, integritas akan membuat fiskus bekerja secara profesional.

“Semua konsultan pajak itu harus membantu DJP dalam menjaga integritas. Dengan cara, kita harus bisa menyampaikan ke klien peraturannya yang benar, lalu klien harus melakukan perubahan apa supaya sesuai dengan peraturan karena ini terkait tingkat kepatuhan WP,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi DJP yang tidak pernah lagi menganggap konsultan pajak sebagai “musuh” kala bertemu saat pemeriksaan atau di pengadilan pajak. DJP juga kini lebih terbuka dan mau bersinergi dengan konsultan pajak untuk menyiarkan pajak di berbagai kesempatan.

“KPP beberapa kali mengundang TaxPrime untuk memberikan *training* atau *sharing session* dari praktisi. Artinya, DJP sudah membuka diri kepada konsultan, menganggap bahwa konsultan adalah mitra untuk meningkatkan kepatuhan, meningkatkan *tax ratio*. Dengan membantu memberikan pemahaman kepada WP, saya yakin *tax ratio* akan naik.”

Prestasi bersama

Saut akui, pencapaiannya selama ini dalam menyelesaikan sengketa tak lepas dari kerja sama tim yang solid. Bahkan, hasil upaya bersama ini berhasil mengantarkan TaxPrime menjadi nomine Tax Dispute of



Foto: Ivan Fazry



**AWAL-AWAL SAYA
DISURUH PEGANG
SIDANG, KERINGAT
DINGINNYA MINTA
AMPUN—MELIHAT
DIRI SENDIRI,
DI SAMPING KANAN
ADA DJP, DI DEPAN
ADA HAKIM.**

the Year di ajang International Tax Review (ITR) Award Asia-Pacific di setiap tahunnya.

TaxPrime telah mengikuti acara bergengsi ini sejak tahun 2019, atau saat berumur tujuh tahun. Ini menandakan, di usia yang terbilang muda TaxPrime mampu mengawal *people* atau sumber daya manusianya menuju kesuksesan.

“Saya dulu enggak kebayang *tax dispute* masuk nomine ITR secara internasional. Saya cuma kebayang, gimana caranya menang sengketa. Tapi ketika ikut mendaftar lalu persiapan, dan ternyata masuk; yang hebat ya, tim saya—bukan Saut,” kata pencinta ikan hias ini.

“Saya berani bilang bahwa 95 persen kami berhasil. Keberhasilan itu adalah hasil kerja dari teman-teman dalam mengumpulkan dokumen, mencari

peraturan, menyiapkan argumentasi, dan menyampaikan,” imbuhnya.

Ia dan tim pun menargetkan agar bisa menjadi pemenang, meski nomine lainnya juga sangat profesional dan berpengalaman.

“Ibaratnya kami masih SD ikutan *international award* dan memang benar-benar kami yang mengerjakan sendiri persiapan mengikuti ajang ini, belum ada tim khusus,” ucapnya.

Di luar pengakuan penting itu, ia juga selalu bersedia apabila ada junior yang giat belajar dan mengembangkan diri menjadi konsultan pajak yang cakap.

“Mereka (staf) senang kerja di TaxPrime karena memang enggak ada *gap* antara *lower level* sampai level teratas. Jadi, kapan pun mau belajar dengan yang teratas pun bisa. Dan, walaupun kita punya *deadline*, tapi kalau di sisi lain ada keluarga staf yang lebih membutuhkan dan lebih *urgent*, biasanya lebih di-*loose*. Jadi anak-anak mengerjakannya enggak ada *pressure*, memang ketika mereka lagi fokus.”

Upaya lain yang dilakukan Saut untuk memaksimalkan kemampuan konsultan pajak junior adalah memercayakan pengurusan beberapa kasus sengketa pajak dengan langkah bertahap.

“Pertama menjelaskan ke kami, selanjutnya menjelaskan ke klien, kemudian menjelaskan ke otoritas pajak, baru dia ke pengadilan menjelaskan ke hakim. Jika mereka diberikan suatu kepercayaan, mereka akan percaya diri dan mereka pasti akan mempersiapkan, mempelajari peraturan, mempelajari dokumen,” ucapnya.

Dengan kemampuan para junior yang terus berkembang, Saut berharap akan tercipta penerus-penerus konsultan pajak hebat yang bisa menggantikannya kelak.

“Nanti mereka akan maju sendiri, mereka akan menjadi seorang manajer atau partner nantinya. Atau mereka akan membuka kantor konsultan yang lain. Jadi, saya dengan para *leader* ingin ada regenerasi. Tidak mungkin, kan, kalau sudah 70 tahun saya masih ikut datang sidang,” tutup Saut yang tengah giat merintis usaha budidaya ikan discus ini.